

CATRA

MENGAYOMI & MENCERDASKAN



MAJALAH WANTANNAS

EDISI XXXVIII

TAJUK UTAMA:

PRA SIDANG
WANTANNAS BAHAS
BACKLOG
PERUMAHAN & TIGA
ISU STRATEGIS
LAINNYA



INFO KITA:

Pegawai PPPK Perkuat Setjen Wantannas, Pertajam Profesionalitas
Mengenal Lebih Dekat Seni Kepemimpinan Militer
Membangun Kolaborasi Kompetensi melalui Digital Smart ASN



Selamat Hari BELA NEGARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga majalah Catra edisi XXXVIII/2023 dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Majalah ini merupakan bentuk penyampaian informasi, pengetahuan maupun wawasan.

Tim Redaksi Majalah Catra terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan yang disajikan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Catra ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Sejalan dengan itu, artikel yang disajikan pada penerbitan majalah Catra edisi XXXVII/2023 ini dengan topik utama yaitu Setjen Wantannas Resmi Dipimpin Nahkoda Baru. Pada rubrik Info Kita ada Sinergi Wantannas, Ksp Dan Lemhanas Dalam Penanganan Isu-Isu Strategis; Setjen Wantannas Raih WTP Yang Ke-16 Kalinya; Pentingnya Keamanan Siber Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Jadi Topik Menarik Pada Konferensi Dti-Cx; serta Tim KKDN Setjen Wantannas Kunjungi Jember Dan Labuan Bajo Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata. Pada rubrik Opini ada Menerawang Kompleksitas Kerawanan Pemilu Serentak 2024; Berprestasi di Usia Senja; dan Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Perpekstif Filsafat Hukum Jilid 1.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Catra masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pelindung: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han); Penanggung Jawab: Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S.; Redaktur: Kolonel Inf. Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P.; Penyunting/Editor: Desi Fajar Nita, S. Sos., Natalina Pakpahan, S.I.Kom; Desain Grafis: Riza Savitri, A.Md., Fauziah Nurunnajmi, S.E Fotografer: Yayat Ruhiat, A.Md, Kiswanto Redaksi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 0213863983 Fax 021-3441683, email: dangmas@wantannas.go.id; dangmaswantannas@gmail.com;

DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA :

- Setjen Wantannas Resmi Dipimpin Nahkoda Baru...
.....4

INFO KITA :

- Sinergi Wantannas, KSP dan Lemhanas dalam Penanganan Isu-Isu Strategis.....7
- Setjen Wantannas Raih WTP yang ke-16 kalinya.....8
- Pentingnya Keamanan Siber Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Jadi Topik Menarik Pada Konferensi DTI-CX.....9
- Tim KKDN Setjen Wantannas Kunjungi Jember dan Labuan Bajo dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata.....10

OPINI :

- Menerawang Kompleksitas Kerawanan Pemilu Serentak 2024.....12
- Berprestasi di Usia Senja.....16
- Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Perpekstif Filsafat Hukum Jilid 1.....18

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- Ketok Palu! RUU Kesehatan SAH jadi Undang-Undang.....22

TAHUKAH ANDA :

- DJP usung tema: “Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan”.....24
- Apa itu Diskresi?26
- Apa Itu Transfer Pricing dan Aspek Perpajakannya?.....27

Inspirasi Bulan Ini



Jangan Buang Waktumu Untuk Mengeluh

Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan.

Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali.

Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya.

Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut.

Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat “jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis,”

Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh dan mengeluh tanpa ada tindakan.

Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang di hadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

Hal inilah yang membuat kita tetap berada diposisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Ayo mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.



Pra Sidang Wantannas Bahas *Backlog* Perumahan & Tiga Isu Strategis Lainnya

Oleh : Natalina Pakpahan

Setjen Wantannas Bahas *Backlog* Perumahan Dan Tiga Isu Strategis Lainnya Dalam Pra Sidang Ke-4 Tahun 2023 Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya TNI Dadi Hartanto, memimpin agenda Pra Sidang Dewan Triwulan IV Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ruang Batavia 1 Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta, pada Selasa (14/11).

Dalam sidang yang dihadiri anggota Wantannas dari Kementerian dan Lembaga, serta undangan para pakar dan Narasumber tersebut, dipaparkan empat rancangan kebijakan strategis yang dihasilkan dari pengamatan masing masing Kedeputian Sekretariat Jenderal Wantannas terhadap permasalahan strategis nasional.

Materi pertama yang dibahas oleh Kedeputian Sistem Nasional terkait Pemenuhan Kebutuhan Perumahan untuk mengatasi *backlog* Perumahan dalam rangka Penguatan Ketahanan Nasional. *Backlog* Perumahan merupakan kesenjangan antara jumlah rumah ter-

bangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesjen Dadi Hartanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi *backlog* perumahan diprediksi akan semakin tinggi apabila dihadapkan pada ketersediaan (availability) lahan hunian yang semakin berkurang serta harga bahan bangunan yang semakin tinggi. kondisi ini jika dibiarkan akan berisiko pada semakin kecilnya keterjangkauan (accessibility) masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan perumahan baik secara fisik maupun ekonomi.

Diskusi berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi *backlog* perumahan sebagai upaya penguatan ketahanan nasional. Rancangan kebijakan ini disusun untuk memastikan pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai landasan bagi stabilitas sosial.

Brigjen TNI Joko Setyo Putro sebagai ketua Pokja sepakat bahwa kolaborasi berbagai sektor pemerintahan terkait penyediaan

perumahan secara komprehensif mulai dari penyediaan lahan, penyelesaian tata ruang, biaya perumahan, penyediaan sarana dan prasarana umum, pemenuhan untuk pembangunan kota cerdas dapat menjadi alternatif pemecahan masalah *Backlog* perumahan.

Materi kedua yang dibahas oleh Kedeputian Politik dan Strategi terkait Strategi Antisipasi Pengaruh Media Sosial terhadap Pendidikan Karakter Bangsa. Tidak bisa dipungkiri pengaruh negatif media sosial kini semakin terasa dalam

kehidupan masyarakat. Jika dulu, masyarakat Indonesia terkenal berkepribadian gotong royong, bersikap toleran dan suka menolong, maka sekarang sikap dan kepribadian ini mulai tereduksi dengan semakin permisifnya sebagian masyarakat terhadap beberapa tindakan seperti *bullying*, intoleran dan pelanggaran hukum. Tindakan-tindakan negatif banyak dipicu oleh konten-konten negatif melalui media sosial.

Dalam diskusi yang berlangsung, disebutkan bahwa menghadapi era digital harus sesuai dengan Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Melalui rancangan kebijakan diharapkan dapat mewujudkan sikap mental pancasilais melalui antisipasi terhadap pengaruh media sosial terhadap pendidikan karakter bangsa. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pembentukan karakter yang kuat di tengah

masyarakat.

Materi selanjutnya oleh Kedeputian Pengembangan mengenai Strategi Penanggulangan Judi Online. Fenomena judi online semakin meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian negara karena Indonesia menjadi target bandar judi online baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain semakin banyaknya individu kecanduan judi online yang terilit masalah finansial, juga berdampak pada terganggunya kesehatan mental dan bahkan bunuh diri. Selain itu, transaksi judi online beresiko pada mengalirnya uang masyarakat ke luar negeri. Dijelaskan perlu adanya strategi khusus untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat perjudian online. Upaya ini diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional dengan menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang sehat.

Dr. Dadang Herli S., saat diskusi menyebutkan perlunya pembaharuan hukum dalam wujud pembuatan undang-undang yang khusus mengatur judi online, mengingat belum adanya pasal yang tegas yang ditujukan buat penjudi online, karena sejauh ini pasal yang ada baru terkait perihal hukuman kepada pihak yang mendistribusikan atau menyediakan konten judi online.

Selanjutnya paparan terakhir Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan terkait upaya Mengatasi Praktik *Predatory Pricing* untuk Melindungi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Praktik *predatory pricing* dilakukan oleh perusahaan dalam atau luar negeri dengan strategi menjual produk atau jasa dengan harga sangat rendah, atau bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan mengeliminasi pesaing atau mencegah masuknya pesaing baru. Salah satu contoh adalah dengan mem-



banjirnya produk-produk impor sangat murah dari negara asing yang menyebabkan UMKM Indonesia sulit bersaing. Persaingan ini tentu menguntungkan bagi pemenangnya namun menimbulkan iklim yang tidak sehat bagi dunia usaha dan berdampak mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM yang masih memerlukan perlindungan. Dalam diskusi yang dipandu oleh Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan, Laksda TNI Arsyad Abdullah, disebutkan bahwa Fokus pada upaya mengatasi praktik *predatory pricing* dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan sumber daya UMKM melalui dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas UMKM dan perlindungan UMKM dalam persaingan usaha di pasar global. Juga peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi bahaya *predatory pricing* dan mengkampanyekan sikap cinta produk dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan ekonomi nasional melalui perlindungan terha-

dap pelaku usaha kecil.

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto pada kesempatan ini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian dan Lembaga sebagai anggota Wantannas, serta kepada para pakar dan nara-sumber yang turut berkontribusi dalam agenda perancangan empat judul kebijakan strategis ini. Ia mengatakan, hasil diskusi dan rancangan kebijakan ini akan menjadi masukan saran tindak kepada Presiden RI sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

"Semoga apa yang telah kita bahas di hari ini menjadi buah karya kontribusi yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup Sesjen. ***



Wantannas Ajak Pers Awasi Pemilu 2024 Berlangsung Lancar dan Jurdil

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto mengajak insan pers bersinergi untuk kelancaran momen penting bagi demokrasi Indonesia yakni Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, sebagai wujud komitmen dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

"Kerja sama antara Wantannas sebagai pembina ketahanan nasional dan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, jujur, dan adil," ucap Dadi saat pertemuan dengan awak media di kantor Setjen Wantannas, Jakarta, Kamis (23/11).

Menurut Dadi, Setjen Wantannas dan para jurnalis dapat bersinergi dalam mendukung program ketahanan nasional di Indonesia, terutama menjelang Pemilu Serentak 2024.

Dadi mengungkapkan Wantannas juga memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga empat pilar demokrasi yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang diharapkan tidak hanya dijadikan sebagai filosofis, melainkan juga diimplementasikan dalam kebijakan dan program pemerintah.

"Termasuk dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 yang jujur dan adil," lanjutnya.

Di sisi lain, ia mengatakan pers memiliki setidaknya tiga tanggung jawab dalam menghadapi pesta demokrasi. Pertama, menyebarkan informasi yang objektif dan akurat tentang proses pemilu, membantu pemilih membuat keputusan yang tepat. Kedua, mengawasi proses demokrasi melalui pemberitaan yang kritis dan berimbang, khususnya ikut mengawasi jalannya pemilu agar lancar, jujur dan adil.

"Tiga, edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab," paparnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah wartawan media nasional, diantaranya adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI), Metro TV, TV One, SCTV, Kompas, CNN Indonesia dan LKBN Antara.

Terakhir, ia berharap Setjen Wantannas dan pers dapat mengembangkan kerja sama yang lebih erat, bertukar pikiran, ide, serta memperkuat komitmen dalam memajukan demokrasi dan ketahanan nasional di Indonesia.



Pegawai PPPK Perkuat Setjen Wantannas, Pertajam Profesionalitas

Oleh : Farandy Purba

Terhitung sejak bulan Agustus 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Setjen Wantannas RI) secara resmi diperkuat oleh kehadiran 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini. Langkah-langkah ini juga akan semakin memperkuat organisasi dan meningkatkan profesionalitas di dalamnya.

PPPK sendiri merupakan salah satu kelompok pegawai ASN dengan kompetensi kuat dan komitmen dalam melayani negara. Mereka membawa latar belakang dan keahlian yang beragam, yang kemudian diterapkan dalam berbagai unit kerja organisasi melalui jabatan fungsional sehingga menciptakan sinergi yang kuat di antara anggota tim.

PPPK di Setjen Wantannas mengisi berbagai jabatan fungsional yang ditentukan berdasarkan fungsi atau spesialisasi tertentu yang diperlukan. Jabatan fungsional ini memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan bidang tertentu, seperti bidang teknis, ilmiah, atau keahlian khusus.

Penggunaan jabatan fungsional memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien, dengan mencocokkan individu yang memiliki keahlian khusus dengan tugas yang membutuhkan keahlian tersebut. Ini membantu memastikan bahwa tugas-tugas yang memerlukan kompetensi khusus dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar tertentu.

Beberapa jabatan fungsional yang diisi oleh PPPK di Setjen Wantannas mencakup Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat, Ahli Pertama SDM

Aparatur, Ahli Pertama Analisis Kebijakan, Ahli Pertama Arsiparis, Ahli Pertama Pranata Komputer, dan Ahli Pertama Perencana.

Integrasi PPPK ke dalam organisasi telah menjadi kunci dalam memperkuat tim kerja dan memungkinkan kolaborasi yang efektif dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri yang sudah ada, menciptakan lingkungan yang kaya akan gagasan dan inovasi. Berbagai keahlian PPPK dinilai telah membantu mempercepat penyelesaian tugas-tugas organisasi.

Selain manfaat integrasi dalam penguatan tim, profesionalitas juga mengalami peningkatan signifikan. PPPK membawa semangat inovasi dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, yang telah berdampak positif pada kinerja Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sekretaris Jenderal Wantannas, Laksdya TNI Dadi Hartanto, mengapresiasi kontribusi berharga ini. Ia menyatakan bahwa integrasi PPPK telah membawa energi baru ke dalam organisasi dan merupakan langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai termasuk PPPK, yang telah berkomitmen dan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini.

Perubahan positif ini merupakan bukti nyata tentang bagaimana keragaman dalam pegawai pemerintah dapat memperkuat organisasi dan meningkatkan layanan publik. Integrasi PPPK telah menjadi model keberhasilan bagi lembaga sejenis. Tentunya, Setjen Wantannas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanannya kepada bangsa dan negara, dan integrasi PPPK menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan ini.

Day 9
Gelar Wicara

LEAD THE FEST

Mengambil Pelajaran dari Seni Kepemimpinan Militer

Selasa, 7 November 2023
16.00 - 17.30 WIB

Live On

NARASUMBER

Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si (Han)
Deputy Chief of Staff, Directorate of Defense Strategy, UNHAN

Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto M.Tr. (Han)
Initiator, Secretary General, Directorate of National Security, National Community Talent & Technical Team Puspresnas

MODERATOR

Dita Indra
General Staff, Pemimpin.Tenaga Ahli DPR RI dan Head of Business & Training Center PNJ

Mengenal Lebih Dekat Seni Kepemimpinan Militer

Oleh : Mutiara Saraswati

Acara *Lead The Fest* yang diselenggarakan oleh Pemimpin Indonesia community mengadakan gelar wicara pada media online youtube. *Lead The Fest* adalah sebuah festival kepemimpinan yang mengajak segenap elemen bangsa untuk berdiskusi, memberikan ide baru, dan membuat inisiasi baik untuk Indonesia yang lebih baik dan tangguh.

Terinspirasi dari Rumah Peneleh milik HOS Tjokroaminoto, tempat pemimpin – pemimpin bangsa tinggal dan tumbuh. Melalui misi ini komunitas Pemimpin Indonesia memiliki tekad untuk membuat ekosistem kepemimpinan Indonesia lebih baik melalui berbagai kegiatan, pendidikan, dan penyebaran informasi.

Sesjen Wantannas Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han) menjadi salah satu narasumber bersama dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si (Han) membahas tema Mengambil Pelajaran dari Seni Kepemimpinan Militer Bersama. Melalui pembahasan ini para narasumber diminta *sharing* mengenai pengalaman memimpin. “Dengan pengalaman di kapal perang dengan ruang terbatas dan wahana kecil kita harus tetap bisa

memimpin banyak orang” ungkap Laksdya Dadi.

Dalam paparan yang disampaikan Sesjen Wantannas, salah satu ciri kepemimpinan militer yakni disiplin, struktur organisasi dan karakter yang baik. “Disiplin dan pengambilan keputusan yang cermat lewat komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik” kata Sesjen Wantannas.

Mayjen Priyanto menambahkan, “dalam kepemimpinan dibutuhkan integritas, kejujuran, empati, bisa melayani atau mendengar dan bisa menjadi contoh tentang kesederhanaan”, ungkapnya.

Pengertian pemimpin menurut Suradinata (1997:11) dalam buku Psikologi Kepemimpinan dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (ms)

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 KORPRI Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menghadirkan 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti Ziarah ke Taman Mekan Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata pada hari Rabu, 22 November 2023.

Ziarah ke TMPN Kalibata yang dipimpin Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, Noor Sidharta, tahun ini dihadiri oleh sekitar 1.000 ASN dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pengamalan nilai perjuangan dari para pahlawan bangsa. Ziarah dilakukan di beberapa makam para pahlawan, salah satunya makam mantan Presiden RI ketiga BJ Habibie dan istri serta mantan Wakil Presiden kelima, Soedharmono.

Hari Korpri dirayakan seiring dengan pembentukan Korpri pada tanggal 29 November 1971, yang diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dengan mengusung tema “KORPRIKAN INDONESIA”, diharapkan para anggota KOR-

PRI semakin bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan masyarakat serta mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa sehingga mewarnai proses pembangunan nasional.

Peringatan Hari Korpri 2023 memiliki tujuan, diantaranya:

- Mengajak anggota Korpri di seluruh Indonesia untuk meneguhkan netralitas dan profesionalisme serta meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan kepedulian seluruh anggota Korpri terhadap masyarakat.
- Meningkatkan netralitas dan semangat profesionalisme kepada seluruh ASN.
- Memantapkan fungsi organisasi Korpri sebagai perekat pemersatu bangsa dalam mendukung pembangunan nasional.
- Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan.

Selain ziarah ke TMPN Kalibata, KORPRI juga mengadakan acara Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 di Gelora Bung Karno serta acara puncak yang akan diselenggarakan di Jakarta International Velodrome pada tanggal 29 November 2023.



PEGAWAI SETJEN WANTANNAS IKUTI RANGKAIAN HUT KORPRI KE-52 TAHUN 2023

Oleh : Fauziah Nurunnajmi



MEMBANGUN KOLABORASI KOMPETENSI MELALUI DIGITALISASI SMART ASN

Oleh : Mutiara Saraswati

Mengusung tema “Smart ASN; Belajar, Berkolaborasi, dan Berkinerja” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) paparkan arahan Presiden mengenai Reformasi Birokrasi. Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) Laksdya TNI Dadi Hartanto beserta Deputi Bidang Sistem Nasional (Desisnas) Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar undangan *soft launching platform digital* yang diselenggarakan Kemen PANRB di Hotel The Ritz Carlton Kuningan, Jakarta membahas Reformasi Birokrasi antara lain birokrasi yang berdampak; reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas; birokrasi lincah dan cepat.

Melalui ketiga arahan Presiden tersebut menurut Menteri PANRB, Azwar Anas telah diterjemahkan ke dalam 7 program prioritas Kemen PANRB meliputi Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian, Berdampak pada Jutaan ASN, Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 Kluster Prioritas, kemudian Transformasi Profesionalisme ASN Berbasis Digital (meliputi Penyederhanaan Birokrasi & Jabatan Fungsional) dan Penataan Tenaga Non-ASN (Honorir). “Ketika Perpres SPBE hadir untuk mempercepat dan apa yang kita kerjakan menjadi bagian dari sistem pemerintah berbasis elektronik maka respon dari berbagai pihak sangat besar dan positif”, ungkap Azwar Anas.

Digitalisasi berbasis arsitektur SPBE sebagai pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi Masyarakat. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) antara lain RB penanggulangan kemiskinan, RB peningkatan investasi, dan RB percepatan prioritas aktual presi-

den. Dalam rangka mendorong motivasi sekaligus memberikan penghargaan kepada Pemda yang telah berkomitmen melaksanakan RB berdampak, maka besaran kontribusi Indeks RB sebagai penentu besaran TPP Pemda perlu ditingkatkan dari hanya 2% menjadi minimal 30% dengan beberapa pertimbangan. “Sehingga dengan demikian digitalisasi menjadi penilaian penting bagi daerah,” imbuh Azwar Anas.

Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemen PANRB mengatakan dalam pidato nya mengenai *pilot project*, “Kolaborasi akan kita perluas, kami undang 79 K/L yang akan menjadi *pilot project*, akan ada beberapa modul yang barangkali akan mempermudah dalam rangka berkolaborasi” ungkapnya.

Dengan fokus piloting antara lain media sosial, pembelajaran dan talenta. Tujuan pelaksanaan piloting adalah melihat *user experience* penggunaan platform untuk membantu ASN, mendapatkan *user feedback* terhadap penggunaan platform dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul secara tak terduga selama pelaksanaan piloting.

“Yang muda belajar *wisdom* dari yang senior, yang senior belajar teknologi dari yang muda, dan kemudian kita akan merasakan bahwa tidak ada orang yang paling penting, tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang yang paling menguasai segala sesuatunya. Setiap orang pasti punya *knowledge*, punya *skill* yang bisa *dishare* kepada orang lain, kemudian membangun kekuatan kolaborasi, membangun *talent* untuk Indonesia, sehingga daya saing kita, *competitiveness* kita bisa di *benchmark* sebagai sebuah negara maju.” tambah Alex.*** (ms)



Perwira Menengah Setjen Wantannas Raih Penghargaan Internasional

Perwira menengah TNI yang bertugas di Setjen Wantannas mengharumkan Indonesia di kancah internasional dengan mendapatkan penghargaan dalam event Global Leadership Summit (GLS) 2023 yang diselenggarakan oleh *United Peace Keepers Federal Council* (UNPKFC) bersama UNESCO di Bangkok, Thailand pada Minggu (26/11/2023).

Perwira menengah tersebut adalah Letkol Laut (P) DR (H.C) Ario Sasongko S.E., M.P.M., M.M., GSC, Analis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana Deputy Sistem Nasional Setjen Wantannas, yang merupakan salah satu kandidat Prajurit Berdedikasi dalam ajang Sudirman Award 2023, turut mendapatkan Penghargaan Tertinggi di Bidang Global Humanitarian atas kerja nyatanya meningkatkan kemampuan sumber daya generasi muda yang tidak mampu tanpa memandang suku, agama dan ras serta masih berlangsung hingga saat ini. Letkol Ario sebelumnya juga telah mendapatkan penghargaan di Bidang Humanitarian tingkat Regional dari UNPKFC pada tahun 2022.

Sementara itu melalui keterangan resmi, Dr. Aphinita Chaichana, Global President UNPKFC di Thailand menyampaikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, sehingga

mendapatkan tempat dalam hati penyelenggara acara di Thailand.

Ia menerangkan pada tahun 2023 ini adalah momentum hari istimewa untuk mengakui pencapaian tertinggi atas semua individu yang bertugas dan bekerja atas nama pemerintah atau non-pemerintah yang telah melakukan hal terbaik di bidang, budaya, perdamaian, pertahanan, keamanan dan kemanusiaan. "Ini termasuk dalam ajang GLS 2023 di Bangkok, Thailand. UNPKFC berusaha selalu aktif memberikan apresiasi terhadap aksi pengorbanan setiap individu yang dinilai berperan aktif dalam hal perdamaian dan tindakan kemanusiaan di tingkat global," ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 orang dari 48 negara. Tampak hadir pula dalam event tersebut sebagai keynote speakers lainnya, yaitu Secretary General Jamaica National Commission for UNESCO HE Everton Hannam dan Former Police Commissioner UNAMID Inspector General (Ret) Dr Sultan Azzam Temuri, serta Kolonel Inf Yesi Kristian Mambu, Atase Pertahanan Indonesia untuk Thailand mewakili Duta Besar RI. (Humas/ FP).



Setjen Wantannas terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya yang juga sebagai Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum di Biro Umum Setjen Wantannas Imam Supriyadi menyampaikan, langkah ini diambil untuk memperkuat kompetensi dan pengetahuan para ASN, yang diharapkan akan berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. "Pendidikan tinggi menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas dan kualifikasi pegawai. Setjen Wantannas berkomitmen untuk mendukung para ASN dalam melanjutkan pendidikan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya," ungkap Imam, Selasa (13/12).

Langkah ini menurutnya sejalan dengan visi organisasi untuk menjadi lembaga yang unggul dan responsif terhadap dinamika lingkungan. Peningkatan SDM diharapkan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif dalam mendukung keberhasilan misi-misi strategis. "Teman teman di Wantannas saya dorong untuk melanjutkan pendidikannya, yang SMA bisa lanjut S1, S1 bisa S2, dan seterusnya untuk peningkatan SDM kita yang tentunya akan mendorong organi-

sasi kita kedepan," terangnya.

Pendidikan menjadi krusial bagi sebagian ASN Setjen Wantannas. Menurut Reno Andriansyah, Analis SDM Aparatur Ahli Muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di bidang manajemen dengan predikat cum laude, pendidikan penting untuk mendorong perkembangan organisasi. "Dengan gelar akademik ini, kita bisa meningkatkan kemampuan, menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang baru, gagasan, dan terobosan baru yang memang diperlukan organisasi," ucap Reno.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan para ASN akan semakin termotivasi untuk terus meningkatkan diri melalui pendidikan lebih tinggi, menciptakan SDM yang unggul, dan menjadikan Setjen Wantannas sebagai lembaga yang selalu siap menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2023 terdapat 8 orang ASN Setjen Wantannas yang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) dengan berbagai bidang keilmuan. Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto memberikan apresiasi secara langsung kepada para ASN yang mau meningkatkan kemampuan dengan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sesjen berharap ilmu yang telah mereka peroleh dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kemajuan Setjen Wantannas.



DEKLARASI PEMILU DAMAI DAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN PENDANAAN BERSAMA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



Membangun Iklim Politik Kondusif Dalam Rangka Mencapai Demokrasi Berkeadaban Untuk Suksesnya Pemilu 2024

Oleh : Agus Suprpto, S.Sos., M.A.P

Meningkatkan iklim politik yang kondusif dengan tujuan untuk mencapai demokrasi yang berkeadaban merupakan salah satu upaya yang terkait dengan konsolidasi demokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Iklim politik yang kondusif berkaitan dengan antara lain; terbukanya persaingan kompetisi secara sehat dan perilaku yang adil dalam konteks pemilu, berpegang kepada moralitas agama, etika politik yang menjunjung toleransi, menjaga kesetaraan, perlindungan hak-hak rakyat, pluralisme dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hukum independen, HAM, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi. Tingginya tingkat kepatuhan dan konsistensi terhadap semua elemen tersebut akan meningkatkan demokra-

si yang berkeadaban, suatu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai ideologi dan konstitusi negara Indonesia.

Namun demikian proses demokrasi yang telah berlangsung lebih dari 24 tahun sejak reformasi, ternyata belum sepenuhnya sesuai demokrasi berkeadaban yang diharapkan, antara lain; masih kuatnya tindakan memaksakan kehendak oleh masyarakat atas nama kebebasan *civil society*, banyaknya fitnah politik, propaganda dalam pembentukan opini publik, kebebasan media yang kebablasan dan kampanye hitam (*black campaign*) dalam praktik politik, lemahnya kelembagaan partai, terjadinya politik transaksional, oligarkhi di lingkungan parpol, adanya tindakan main hakim sendiri serta

lemahnya penegakan hukum.

Kelemahan demokrasi tersebut dapat dirumuskan dalam 3 unsur penting dalam konstruk peradaban dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Masalah kultur demokrasi yang meliputi sistem nilai dan perilaku. 2) Masalah struktur, ini menyangkut institusi demokrasi dan fungsinya. 3) Masalah faktor pengaruh luaran yang meliputi kondisi obyektif internasional regional dan kondisi obyektif nasional. Mencermati fenomena demokrasi yang berkembang sebagaimana diuraikan di atas dalam rangka mencapai demokrasi berkeadaban bagi kehidupan masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka diperlukan peningkatan "iklim politik" yang kondusif dari masyarakat, partai politik guna mencapai demokrasi berkeadaban.

Berangkat dari persoalan di atas, Bagaimana meningkatkan iklim politik yang kondusif menuju demokrasi berkeadaban? Analisa

Di lihat dari Kondisi Objektif, Protes politik, aksi unjuk rasa, konflik pilkada dan kampanye yang diwarnai dengan cara destruktif. Tindakan ini sering dimaknai sebagai tindakan anarkis. Ini disebabkan oleh kekecewaan yang mendalam (frustasi sosial), ketidakadilan ekonomi, perlakuan hukum karena tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat, ketidakpedulian elite politik dalam memahami persoalan sosial masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan yang pemecahannya hanya bersifat ins-tan dan tidak berkesinambungan. Berbagai data tentang konflik, kisruh, kerusuhan dan kekacauan yang bersifat anarkis disertai tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dapat dicontohkan misalnya: 1) kisruh sidang MK dalam kasus pilkada Papua; 2) pembakaran gedung KPU, Bawaslu, DPRD, Dinas Kebersihan dan kantor Bank Papua dalam kasus diskualifikasi kepersertaan bakal calon bupati dan wakil bupati Yalimo; 3) pemblokiran jalan tol dalam aksi unjuk rasa buruh; 4) kasus-kasus kekerasan yang dipicu oleh sentimen agama yang terjadi di Sampang, pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar; 5) tawuran antar masyarakat; 6) merebaknya konflik sosial berlatar belakang sengketa lahan, masalah perburuan, kecurangan penyelenggara pemilu dan ambisi para elite dalam

perebutan kekuasaan yang memicu terjadinya berbagai konflik kerusuhan.

Kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi merupakan sebuah keniscayaan akan tetapi kebebasan tanpa batas yang muncul kepermukaan dalam pertarungan dan perebutan pengaruh antar kekuatan politik khususnya partai politik dengan menggunakan berbagai sarana sehingga memicu fitnah, konflik dan terjadinya *black campaign*. Namun fenomena tersebut justru terjadi diantara elite politik yang melibatkan pendukungnya. Isu-isu yang diangkatnya berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi, dan tindakan kejahatan lainnya. Penyebab lainnya dari semua ini terjadi, akibat hilangnya keteladanan, provokasi yang menyebarkan kebencian dan permusuhan, juga tidak tuntasnya penyelesaian berbagai masalah sensitif yang menjadi perhatian publik. Survei-survei menunjukkan menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga demokrasi (DPR, partai politik, pemerintah dan lembaga peradilan serta aparat penegak hukum). Hal ini disebabkan oleh masifnya tindak pidana korupsi oleh elite di pemerintahan, pengabaian elite terhadap tuntutan publik, hilangnya kejujuran, integritas yang lemah dan hilangnya keteladanan elite pemerintahan. Sebagai contoh: hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Peneliti utama Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 58,7 % menyatakan tidak percaya terhadap anggota dewan. Sedangkan Indikator Politik Indonesia menyampaikan data 59,0 % publik tidak percaya terhadap parpol, juga melaporkan data mengenai kepercayaan terhadap KPK 71,% sedangkan terhadap lembaga penegak hukum lainnya di bawah 61%. Hasil kedua survei tersebut mengenai penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi hampir memiliki kesamaan dengan survei lembaga lainnya dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun dengan adanya dugaan suap terhadap ketua KPK.

Dalam perkembangan politik di Indonesia, media menjadi salah satu kekuatan yang memiliki kekuasaan kontrol yang tidak terbatas. Jaminan terhadap kebebasan pers diatur dan dilindungi dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Namun dalam praktiknya kekuasaan media yang besar

OPINI

justru dimanfaatkan oleh para pemilik media dan korporasi tertentu yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan politik daripada media sebagai penyaluran aspirasi dan informasi publik yang berimbang dan mencerdaskan.

Partai politik sebagai organisasi, pengelolaan-nya belum sepenuhnya menggunakan manajemen moderen, masih bersifat oligarkhis, dan orientasinya lebih mengutamakan kekuasaan daripada menjalankan fungsinya. Hal lain praktik politik uang dan suap marak dalam setiap pemilu. Ini menyebabkan elite politik yang terpilih banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi. Data KPK menunjukan untuk pelaku korupsi penyelenggara negara (anggota DPR/ DPRD, kepala lembaga negara/kementerian, duta besar, komisioner, gubernur, walikota, bupati dan wakil, eselon I, II, dan III, hakim serta lainnya) berdasarkan jabatan tahun 2004-2022 berjumlah 430 kasus. Dalam hal pengelolaan partai politik, masih tradisional akibatnya berpengaruh pada harapan dan kepercayaan publik terhadap parpol. Berdasarkan data KPU tingkat partisipasi pemilih pada pilkada rata-rata hanya mencapai 60%, bahkan pada pilkada terakhir di Sumatera Utara tahun 2020 hanya mencapai 76,9 persen %. Partai politik juga semakin memperkuat praktik dinasti politik, ini menyebabkan pengelolaan manajemen partai belum sepenuhnya sebagai partai moderen.

Hal ini karena Kebebasan *civil society* yang tidak terkontrol; Lemahnya etik, moral, perilaku, dan integritas elite politik; Belum berkembang-nya parpol yang modern. (Rendahnya demokrasi internal partai, lemahnya pelembagaan partai, dan tidak berfungsinya fungsi partai politik); Kebebasan media yang tidak terkontrol; serta Lemahnya penegakan dan keadilan hukum.

Implikasi masalah dari Kebebasan *civil society* yang tidak terkontrol berimplikasi pada maraknya tindakan anarkis; Lemahnya etik, moral, perilaku, dan integritas elite politik berimplikasi kepada arogansi politik, sensitivitas rasa malu dan rasa bersalah sudah tidak ada, maraknya politik transaksional dan korupsi serta meng- halalkan berbagai macam cara; Belum berkembangnya parpol yang modern berimplikasi pada rendahnya demokrasi internal partai, lemahnya pelembagaan partai, tidak berfungsinya partai politik, makin menurun-

nya kepercayaan publik kepada partai politik, lembaga-lembaga demokrasi dan meningkat-nya Golput serta apatisme terhadap sistem demokrasi; Kebebasan media yang tidak terkontrol berimplikasi pada munculnya informasi publik yang bersifat fitnah, propaganda, provokatif, black campaign dan tidak mendidik masyarakat, yang praktiknya didesain oleh kepentingan pemilik dan korporasi; dan Lemahnya penegakan dan keadilan hukum berimplikasi pada tindakan main hakim sendiri, anarkis kepada aparat penegak hukum serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Sehingga maraknya tindakan anarkis cenderung berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan, menurunkan wibawa lembaga negara, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga konsolidasi demokrasi terhambat; Arogansi politik, sensitivitas rasa malu dan rasa bersalah sudah tidak ada, maraknya politik transaksional dan korupsi serta perilaku meng- halalkan berbagai macam cara, cenderung meningkatnya persaingan politik, kerenggangan hubungan antar *elite*, konflik antar elite dan masyarakat serta terabaikannya kepentingan masyarakat; Rendahnya demokrasi internal partai, lemahnya pelembagaan partai, tidak berfungsinya partai politik, makin menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik, lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatnya golput serta apatisme terhadap sistem demokrasi cenderung menimbulkan kekacauan dan defisit demokrasi; Munculnya informasi publik yang bersifat fitnah, propaganda, provokatif, black campaign dan tidak mendidik masyarakat cenderung meningkatnya tensi politik, sikap apolitik warga, kebencian masyarakat kepada pejabat negara, kompetisi yang tidak sehat, kebencian kepada media, dan mengadu domba elite serta masyarakat; dan Tindakan main hakim sendiri, tindakan anarkis kepada aparat penegak hukum dan menurunnya kepercayaan kepada lembaga peradilan cenderung tidak percaya terhadap kinerja lembaga peradilan.

Berkembangnya demokrasi di berbagai belahan dunia, terjadinya krisis politik di Kawasan Timur Tengah, serta ketidakmampuan organisasi internasional dalam menyelesaikan

kekerasan politik yang bekecamuk di berbagai belah dunia membawa pengaruh buruk bagi perkembangan demokrasi yang masih belum sepenuhnya matang dan beradab pada sebuah negara.

Pada bagian lain di negara-negara Kawasan ASEAN kehidupan politik relatif kondusif. Di Indonesia, era reformasi telah membuka kebebasan yang demikian luas, dimana lembaga-lembaga perwakilan memegang peran penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun demikian masih terjadi kesenjangan terhadap kinerja lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dengan harapan yang dituntut oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang bermuara pada tindakan-tindakan protes politik, kegaduhan politik, anarkisme, konflik serta ada kekecewaan terhadap perkembangan reformasi.

Berkembangnya parpol, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan *civil society* lainnya belum sepenuhnya menjadi kekuatan utama untuk menyangga demokrasi. Partai politik justru mengembangkan tradisi-tradisi yang tidak baik seperti transaksi politik, dinasti politik di dalam partai politik dan partai politik tidak mengoptimalkan fungsinya sebagai partai politik moderen. Sebaliknya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan *civil society* justru terseret ke dalam arus kegaduhan politik. Keadaan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Walau demikian masih ada harapan sebagian mas-

yarakat tetap percaya bahwa demokrasi adalah pilihan sistem politik yang terbaik bagi Indonesia.

Mewujudkan pembangunan iklim politik kondusif melalui kontrol civil society yang efektif, dan terukur terhadap peningkatan etik, moral, perilaku dan integritas elite politik, pengembangan partai politik modern, serta perkuatan penegakan hukum dan keadilan serta kontrol yang terukur terhadap kebebasan media, dalam rangka mencapai demokrasi yang berkeadaban. Kesimpulan

Iklim politik sejak era reformasi masih belum menjunjung nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban seperti; menjunjung nilai-nilai moral dan etika, kurangnya integritas elite politik, belum moderennya kelembagaan partai, maraknya oligarki dan transaksi politik, masifnya fitnah politik dan black campaign serta tingginya protes politik yang menggunakan cara-cara kekerasan. Selain itu, penegakan hukum sebagai prinsip penting dalam demokrasi masih belum sepenuhnya berjalan. Sementara itu, media sebagai sumber informasi penting bagi publik, belum bisa dikontrol agar sesuai dengan fungsi ideal media dalam memberikan pemberitaan yang seimbang dan mencerdaskan. Oleh karena itu, agar iklim politik yang kondusif menuju demokrasi berkeadaban dapat tercapai, maka diperlukan peningkatan "iklim politik" yang kondusif dari masyarakat, partai politik dan penyelenggara negara guna mencapai demokrasi berkeadaban.





LHKPN SEBAGAI BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Jilid 2

Oleh: Dr. Nur Chusniah,SH,MHum

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul “Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dalam Perpektif Filsafat Hukum”.

LHKPN sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi selama ini hanya digunakan untuk pendataan tentang sumber pendapatan dan pengeluaran, asal-usul harta kekayaan termasuk hutang dan pajak pribadi bagi si Penyelenggara Negara sedangkan bagi KPK sebagai Komisi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara digunakan sebagai pendataan tentang jumlah Penyelenggara Negara yang mendaftar dan melaporkan harta kekayaannya serta digunakan KPK untuk mensosialisasikan kewajiban pelaporan dan mengupayakan pengenaan sanksi ter-

hadap penyimpangan atau ketidaktaatan atas kewajiban tersebut. Namun dalam praktek selanjutnya KPK juga beberapa kali berusaha mengaitkan antara pelaporan LHKPN dengan penindakan korupsi.

Upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dilakukan oleh satu lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana Pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU KPK).

Kegiatan pengelolaan LHKPN oleh KPK dapat dilihat alur proses sebagai berikut:

1. Pendataan Wajib LHKPN, merupakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Penyelenggara Negara yang berkewajiban melaporkan kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerimaan LHKPN, adalah kegiatan pencatatan dengan mengagendakan dan memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Pemberian tanda terima akan diberikan langsung kepada Penyelenggara Negara atau yang mewakili apabila penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung baik di kantor KPK atau instansi, atau dikirimkan melalui pos apabila penyampaian LHKPN dilakukan tidak langsung.
3. Verifikasi LHKPN, adalah kegiatan meneliti kebenaran pengisian formulir, kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penyelenggara Negara sesuai petunjuk yang ditetapkan KPK. Dalam hal terdapat ketidak tepatan pengisian formulir atau ketida-

klengkapan dokumen pendukung, KPK akan memberitahukan kepada Penyelenggara Negara atau yang mewakili baik secara langsung pada saat penerimaan atau melalui surat permintaan resmi.

4. Pengolahan Data LHKPN, kedalam sistem informasi KPK adalah mengolah data LHKPN kedalam format tertentu yang dirancang oleh KPK, guna mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pengumuman maupun untuk keperluan pemeriksaan.

5. Pengumuman LHKPN, dilakukan sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan oleh KPK. Pengumuman dilakukan di papan pengumuman pada instansi dimana Penyelenggara Negara bersangkutan bekerja selama satu bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman diterima.

Mekanisme pemeriksaan LHKPN oleh KPK sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

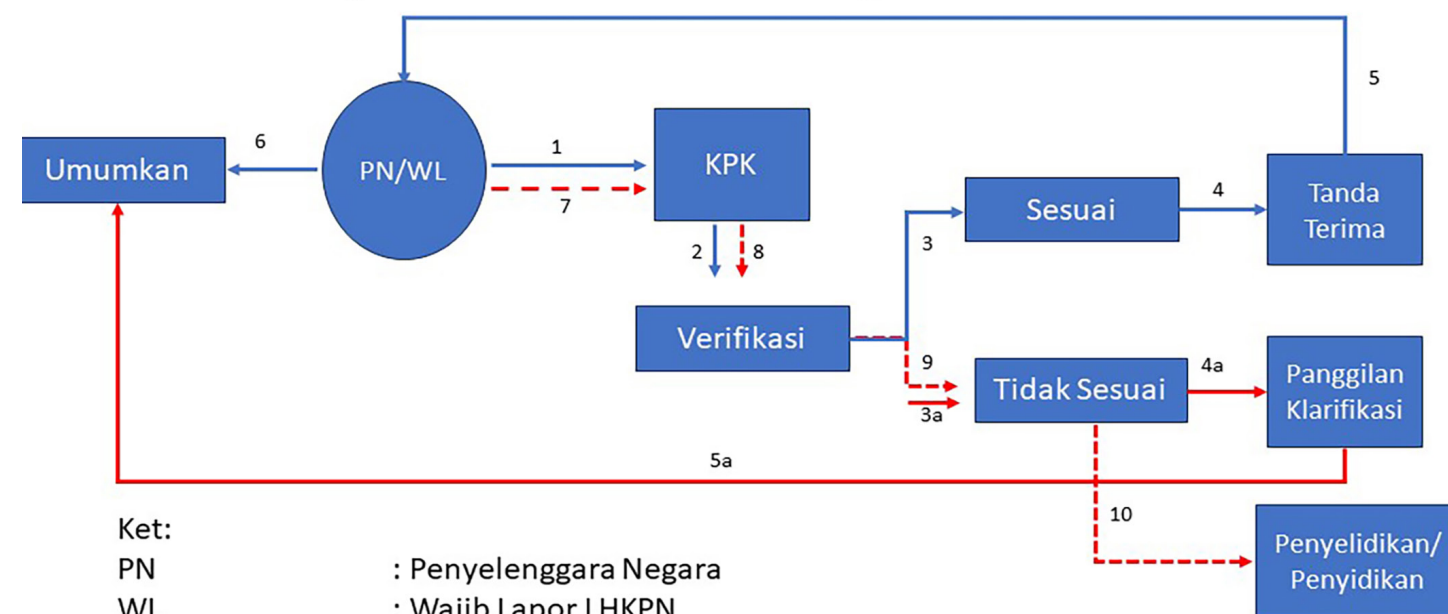
1. Penyelenggara Negara atau Wajib Laporan LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
2. KPK melakukan verifikasi apakah LHKPN tersebut telah diisi dengan benar disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
3. LHKPN telah diisi benar dan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Hasil verifikasi KPK tidak sesuai antara yang ditulis di LHKPN dengan dokumen-dokumen pendukungnya
4. KPK menerbitkan Tanda terima LHKPN. KPK membuat surat panggilan klarifikasi, apabila hasil verifikasi tidak sesuai
5. Tanda terima LHKPN disampaikan KPK kepada Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN. Surat panggilan klarifikasi dikirim kepada Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN.
6. Penyelenggara Negara/Wajib Laporan LHKPN mengumumkan ke Lembaran Negara atau media surat kabar nasional
7. Penyelenggara Negara/Wajib Laporan LHKPN datang ke KPK untuk melakukan klarifikasi dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang kurang atau belum diserahkan kepada KPK.

OPINI

Untuk mengetahui harta Penyelenggara Negara sesuai atau wajar antara pendapatan dan penghasilan yang dilaporkan, penambahan sumber harta signifikan sesuai yang dilaporkan atau tidak, dan segala harta yang berkaitan dengan jabatannya, maka KPK dapat melaku-

kan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Apabila ditemukan ketidakwajaran harta kekayaannya maka dapat dijadikan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi.

Bagan: Pemeriksaan LHKPN Sebagai Bukti Permulaan TIPIKOR



Ket:
 PN : Penyelenggara Negara
 WL : Wajib Lapor LHKPN
 Biru : Proses pemeriksaan awal
 Merah : Proses pemeriksaan klarifikasi
 Merah Putus : Proses Pemeriksaan ke arah penyelidikan/penyidikan

Sumber: PERKOM Nomor 7 Tahun 2016 jo PERKOM Nomor 2 Tahun 2020 Diolah oleh Peneliti

Dari bagan tersebut dalam proses verifikasi kedua (garis merah putus), Penyelenggara Negara menyampaikan klarifikasinya disertai bukti-bukti dukung tentang kekurangan LHKPN yang telah dilaporkan sebelumnya. Kemudian KPK melakukan verifikasi kembali dan apabila tidak sesuai dengan bukti pendukung yang ada atau KPK menemukan ketidak benaran pengisian LHKPN yang menunjukkan adanya peningkatan harta kekayaan tidak wajar (*illicit enrichment*), maka dapat digunakan oleh KPK sebagai informasi awal atau bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut adanya korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Dengan demikian data LHKPN sangat bermanfaat karena memuat berbagai informasi yang diperlukan penyidik untuk mengetahui kekayaan Penyelenggara Negara termasuk jumlah aset dan rekening yang dimilikinya, sumber pemasukan si pejabat dan istri, besarnya

pengeluaran rata-rata dan sebagainya.

Selanjutnya muncul pertanyaan seperti bagaimana penyidik mengukur kekayaan tidak wajar/peningkatan signifikan? Pada prinsipnya, seorang pejabat dianggap memiliki kekayaan atau peningkatan kekayaan tidak wajar jika selama menjabat/setelah menjabat ada selisih antara jumlah keseluruhan kekayaan pajabat tersebut dengan pendapatannya yang dianggap sah/legal (harta sebelum menjabat, gaji, tunjangan dan/atau keuantungan lain). Selisih itulah yang dianggap kekayaan/peningkatan yang tidak wajar.

Pejabat publik/Penyelenggara Negara mudah dideteksi adanya *illicit enrichment* karena pekerjaan dan sumber pemasukkan utama pejabat publik relative lebih mudah ditelusuri/diketahui dibanding masyarakat pada umumnya, pejabat publik sudah terbiasa membuat pencatatan atas kekayaan mereka secara baik (kewajiban LHKPN) dan pejabat publik adalah kelompok dalam masyarakat yang relatif

memiliki kedudukan/kekuasaan lebih dibanding masyarakat pada umumnya dan negara telah memberikan kewenangan yang luas dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sehingga dapat dideteksi kaitan dengan usaha/bisnisnya

LHKPN berisi pergerakan harta bergerak maupun tidak bergerak dari Penyelenggara Negara baik sebelum, selama dan sesudah menjabat, jumlah dan asal mula hartanya. Akan dapat mudah diketahui pergerakan hartanya yang tidak wajar, misalnya melonjak signifikan sementara jabatan yang disandangnya tidak berubah atau bergeser. Dengan kata lain informasi yang ada di LHKPN yang memuat berbagai hal tentang harta kekayaan dan aset penyelenggara Negara dapat menjadi dasar penyelidikan.

Istilah “bukti permulaan” dapat dijumpai dalam Pasal 17 KUHP yang menyebutkan: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 17 disebutkan:

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Jadi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHP.

Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka, yaitu “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Dengan demikian apabila dikaitkan LHKPN sebagai bukti permulaan maka LHKPN digunakan sebagai awal untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan.



Bagi sebagian orang yang memiliki hobi membaca, situasi lingkungan sekitar tidak menjadi penghalang untuk bisa fokus membaca. Namun, untuk sebagian lagi, kegiatan membaca menjadi sesuatu yang menyenangkan apabila didukung dengan ambience yang mendukung seperti suasana yang hening, udara yang segar juga pencahayaan yang cukup. Situasi demikian akan membawa pembaca lebih menikmati bacaan, sehingga mempermudah menangkap apa yang dibaca.

Ruang baca yang “kekinian” mendorong pengunjung untuk membaca secara rutin dan tidak jarang ditemukan beberapa pengunjung yang tidak beranjak dari tempat duduk dari pagi hingga sore hari.

Situasi yang berbeda ini akan membawa pengunjung untuk kerap datang. Tidak hanya suasana, kemudahan dalam mengakses rak buku di setiap sudut pun menjadi sesuatu yang diagungkan oleh pengunjung. Kesemuanya ini dapat kita temui hanya di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan segala keunikan dan kecanggihannya di dalamnya.

Perpusnas menawarkan beragam kenyamanan yang menarik untuk pengunjungnya. Berikut keunikan yang penulis sampaikan. Belum sampai masuk lobby, pengunjung akan disuguhkan dengan rupa-rupa tampilan instalasi seni misalnya Dinding Futuristik, hologram perjalanan bangsa, lukisan dan foto-foto tokoh nasional. Juga terdapat galeri yang memperlihatkan keberagaman suku dan budaya di Indonesia yang sangat lengkap.

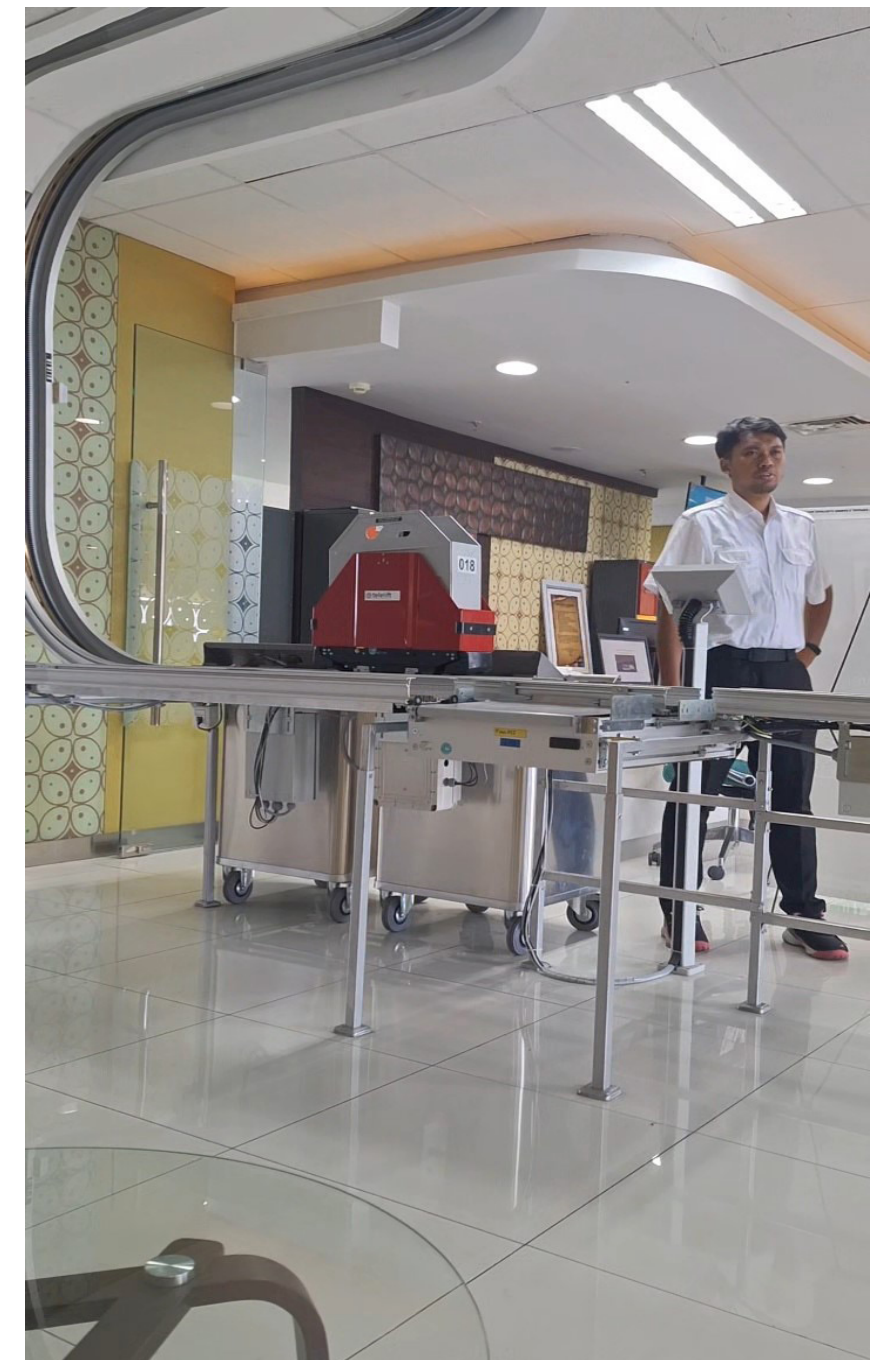
Perpusnas yang berlokasi di kawasan Jalan Merdeka Selatan ini adalah Perpustakaan tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 126,3 meter, 27 lantai termasuk 3 ruang bawah tanah. Terdapat ribuan koleksi buku sehingga pengunjung tidak perlu ragu dengan kelengkapan buku di dalamnya. Selain untuk pelajar dan mahasiswa, anak-anak juga dapat menikmati bacaan buku seperti komik yang terletak di lantai 7.

Mendaftar sebagai anggota Perpustakaan juga sangat mudah, tidak perlu mengantri lama karena pengunjung dapat langsung mendaftar secara online di ruang pendaftaran yang terletak di lantai dua, dan mengambil nomor antrian untuk mencetak kartu keanggotaan. Sungguh sangat efisien bukan? Pengunjung Perpustakaan tidak perlu menung-



Perpustakaan Nasional dengan Segala Keunikannya

Oleh : Yuliani Simbolon



gu lama untuk mendapatkan buku yang diinginkan karena telah tersedia mesin telelift atau yang dikenal dengan transportasi buku secara otomatis. Layanan tersebut untuk memudahkan para peminjam mendapatkan atau mengembalikan buku secara mandiri melalui Anjungan Pengembalian Mandiri. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas komputer yang dapat digunakan kapan saja oleh pengunjung.

Perpustakaan juga menyediakan kantin dan coffee shop dengan harga yang terjangkau di lantai 4, sehingga pengunjung tidak perlu keluar gedung untuk sekedar menikmati santapan. Umumnya perpustakaan hanya beroperasi hingga pukul 16.00 WIB. Namun, Perpustakaan ternyata buka hingga malam hari, sampai pukul 21.00 WIB. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung yang tidak memiliki waktu pada pagi maupun siang hari.****(ys)



UNDANG-UNDANG ASN 2023 RESMI DI SAHKAN

Oleh: Fauziah Nurunnajmi

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan tanggal 3 Oktober 2023 lalu.

Pengesahan tersebut membantu memecahkan kebuntuan selama 2 tahun 9 bulan yang mencakup pembahasan mengenai amandemen undang-undang kepegawaian negara. Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN sudah ada di DPR sejak 2020, kemudian dibahas dan terakhir disahkan pada Oktober 2023.

Dilansir dari kumparan.com, Undang-Undang (UU) ASN yang baru saja disahkan disinyalir mengandung cukup banyak perubahan dibanding UU ASN sebelumnya. Tentunya kita perlu mengetahui apa saja perubahannya dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk langkah selanjutnya, baik pada level individu maupun organisasi.

Perubahan UU ASN tersebut bertujuan agar Indonesia memiliki landasan normatif yang

kuat dan relevan dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dan memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia. Birokrasi sebagai mesin pembangunan harus fokus pada dampak kinerjanya bukan hanya sekadar pada aktivitas administratif belaka. Birokrasi hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengetahui alasan seseorang memilih berprofesi sebagai ASN, 84% responden mengatakan bahwa ia memilih menjadi ASN karena ingin berkontribusi pada negara melalui perbaikan pelayanan publik yang lebih prima. Tentu saja hal ini tidak mudah setidaknya kita harus membangun ASN menjadi mesin tangguh birokrasi yang berdampak melalui tata kelola ASN yang modern dan profesional.

Selain itu, dilansir dari cnbcindonesia.com, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan ada 7 klaster yang menjadi fokus transformasi dari

perubahan UU ini. Beberapa fokus adalah mengenai nasib tenaga honorer yang mencapai 2,3 juta orang hingga digitalisasi ASN. Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam UU ASN baru yang mengatur mengenai 7 klaster perubahan itu.

Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Tujuannya mendorong organisasi yang lincah dan kolaboratif. Rekrutmen ASN harus diselenggarakan mengacu pada prioritas nasional. Dengan demikian, ketika negara menjadikan kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional. Abdullah menekankan rekrutmen ASN seharusnya diarahkan untuk lembaga yang menjadi leading sector terkait.

Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Abdullah menjelaskan tujuannya untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi 'Indonesia-Sentris', sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T bakal turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta pun memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural, maupun dalam penugasan ke organisasi dunia, tidak kehilangan hak kepegawaianya selama menjalankan tugas tersebut.

Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu memaparkan, pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal, seperti penataran, tetapi mengutamakan *experiential learning*. Kemudian magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional berkelas dunia. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN.

Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan beberapa prinsip seperti tidak ada pemberhentian masal terhadap tenaga non-ASN. Selanjutnya tak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Kemudian tidak pula menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan serta memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Abdullah menghitung 99 persen kinerja individu dinyatakan 'baik' dan 'sangat

baik'. Hal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi/instansi. Hal ini yang belum selaras, mengingat masih ada banyak keluhan pelayanan publik. Di dalam draf RUU ASN yang telah disetujui menjadi UU, pemerintah mendorong kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik semakin baik.

Keenam, digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya, dan kompetensi digital para ASN agar berkembang secara baik dan optimal. Abdullah menyebut kompetensi digital menjadi salah satu kompetensi wajib dan penting untuk dimiliki seluruh ASN. Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan penguasaan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah.

Ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Abdullah menegaskan dalam beleid baru ini nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

7 PERUBAHAN RUU ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda dalam transformasi Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Rekrutmen CPNS dan PPPK

Rekrutmen pegawai baru harus menunggu satu tahun sekali, namun bila ada tenaga yang pensiun, resign, atau meninggal bisa terjadi kapan saja.

Kesenjangan Talenta ASN

Mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta di daerah.

Pengembangan ASN

Akan ada *experiential learning* atau magang terlebih dahulu bagi calon ASN sebelum menempati jabatan tertentu.

Tenaga Honorer

Penuntasan penataan tenaga honorer yang belum selesai.

Kinerja ASN

Kedepan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Digitalisasi

Digitalisasi manajemen ASN.

Budaya Kerja

Penguatan budaya kerja dan citra institusi.



Rahasia si “buah ajaib”

oleh: Natalina Pakpahan

Buah ajaib atau miracle fruit disebut juga sebagai miracle berry memiliki kemampuan unik mengubah rasa makanan di lidah. Berkat khasiat uniknya, buah ini dinilai berpotensi menjadi pengganti gula yang lebih sehat. Pernah mendengar tentang buah yang mampu mengubah rasa asam menjadi manis secara ajaib?

Inilah yang menjadi keunikan dari buah yang dikenal dengan si buah Ajaib atau ‘*Miracle Fruit*’. Buah ajaib ini merupakan buah beri berwarna merah cerah yang berukuran sebesar biji kopi. Buah yang memiliki nama *Latin Synsepalum dulcificum* tersebut berasal dari Afrika Barat dan Tengah, tapi sudah semakin populer di banyak negara di dunia berkat manfaatnya untuk kesehatan.

Dilansir dari Prohaba.co, Selasa (1/11/2023), buah ajaib juga disebut berry ajaib, merupakan semak cemara dari keluarga *Sapotaceae*. Buah ini terkenal karena kemampuannya mengubah rasa makanan asam menjadi manis. Ketika buah ini dikonsumsi dan kita mencicipi makanan yang sangat asam, seperti lemon, maka rasa asam pada lemon tidak lagi terasa berkat kemampuan ajaib buah ‘miracle’ ini.

Namun, perlu dicatat bahwa buah ajaib berbeda dengan tanaman kemukus (*Thaumatococcus daniellii*), meskipun keduanya dikenal dengan kemampuan serupa dalam membuat makanan asam terasa manis.

Tanaman ‘*miracle fruit*’ tumbuh sebagai semak atau pohon kecil, dengan tinggi tidak melebihi 5,5 meter (18 kaki) di alam liar, lebih kecil jika dibudidayakan. Daunnya berbentuk

lonjong dengan tepian halus dan tumbuh dalam kelompok di ujung cabang

Bunga putih menghasilkan buah merah sekitar 2–3 cm (0,8–1,2 inci) panjang. Tanaman ini biasanya mulai berbuah setelah tiga atau empat tahun dan membutuhkan tanah asam. Buah ajaib mengandung bahan kimia yang memengaruhi reseptor rasa di lidah, yaitu *glikoprotein miraculin*.

Bahan kimia ini membuat lidah merasakan rasa asam sebagai rasa manis. Efeknya biasanya berlangsung dari setengah jam hingga dua jam, dengan intensitas yang menurun seiring waktu. Molekul glikoprotein yang terdapat dalam buah ini berikatan dengan reseptor rasa ketika bagian daging buahnya dikonsumsi.

Miraculin, dalam hal ini, menghambat reseptor rasa tersebut.

Akibatnya, reseptor manis diaktifkan, menghasilkan sensasi seperti rasa permen segar di mulut. Sesuai dengan namanya, ‘miracle fruit’ memiliki kandungan ajaib yang bisa mengubah rasa makanan dari asam menjadi manis. Bukan cuma itu, buah kecil ini juga memiliki banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan. Beberapa manfaat kesehatan dari ‘*miracle fruit*’ meliputi:

1. Mengelola kadar gula darah

Studi pada tikus menyarankan bahwa baik daun maupun buah dari tanaman ini dapat meningkatkan produksi insulin dan sensitivitasnya, sehingga meningkatkan pengelolaan

kadar gula darah.

Tikus yang diobati dengan tanaman buah ‘miracle’ mengalami perbaikan pengelolaan kadar gula darah dan respons kekebalan. Dalam studi ini, tikus dengan diabetes mengalami perbaikan yang lebih besar dalam kadar gula darah setelah menerima pengobatan dengan buah ‘miracle’ daripada setelah menerima *metformin*, obat yang umum digunakan dalam pengobatan diabetes.

2. Mencegah kanker

Bagian dari tanaman buah ‘miracle’ kaya akan flavonoid dan terpenoid, yang dapat memiliki sifat pencegahan kanker. Studi menyarankan bahwa antioksidan-antioksidan ini dapat mengurangi penyebaran sel-sel kanker ganas, termasuk yang ada di daerah usus besar.

Selain itu, bagian dari tanaman buah ‘miracle’ kaya akan episingaresinol, sejenis antioksidan yang memperlambat proses penuaan dan mungkin membantu mencegah kanker kulit.

3. Memperbaiki gejala asam urat

Studi laboratorium dan pada hewan menyarankan bahwa ekstrak dari tanaman buah ‘miracle’ dapat membantu memperbaiki kadar asam urat dalam darah, yang dapat

menyebabkan asam urat ketika terlalu tinggi. Oleh karena itu, ini dapat berperan sebagai pengobatan potensial untuk asam urat. Bahkan, ‘miracle fruit’ dapat lebih efektif dalam menurunkan kadar asam urat darah daripada allopurinol, obat yang biasa digunakan untuk mengobati asam urat.

Penelitian pada tikus mengungkapkan bahwa ekstrak buah ‘miracle’ menurunkan kadar asam urat dalam darah tanpa memengaruhi organ-organ seperti hati dan ginjal, dan tidak menunjukkan tanda-tanda toksisitas.

4. Mengendalikan serangan epilepsi

Studi terkendali yang menyelidiki potensi potensi antikejang dari buah ‘miracle’ menyarankan, bagian bijinya yang kaya antioksidan dapat memberikan perlindungan dari kematian dan mengurangi waktu pemulihan setelah serangan epilepsi.

Peneliti mencatat bahwa mekanisme yang digunakan oleh buah ‘miracle’ untuk mencapai efek-efek ini masih belum sepenuhnya dipahami dan menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut. Penting untuk diingat bahwa penelitian tambahan pada manusia juga diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya.



TAHUKAH ANDA

Wayang makin mendapatkan perhatian di Indonesia. Wayang adalah seni pertunjukkan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di pulau Jawa dan Bali. Wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, yang menjadi aset budaya nasional.

Pada 7 November 2003, UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia, sebuah Warisan Mahakarya Dunia yang Tak Ternilai dalam Seni Bertutur atau *Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*.

Kemudian wayang Indonesia masuk ke dalam daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO, untuk kategori *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, dengan judul The Wayang Puppet Theater pada 4 November 2008.

Akhirnya, sejumlah komunitas pewayangan di Indonesia dan masyarakat mulai mengusulkan peringatan Hari Wayang Nasional melalui Senawangi (Sekretariat Nasional Wayang Indonesia), yang kemudian dihantarkan oleh Kemendikbud, Kementerian PMK dan Kementerian Sekretariat Negara.

Dilansir dari id.wikipedia.org, sampai saat ini, catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan wayang berasal dari Prasasti Balitung pada Abad ke 10. Pada tahun 903 M, prasasti yang disebut Prasasti Balitung (Mantyasih) diciptakan oleh Raja Balitung dari Dinasti Sanjaya, dari Kerajaan Medang Kuno.

Mereka menyatakan Si Galigi Mawayang Buat Hyang Macarita Bimma Ya Kumara, yang artinya 'Galigi mengadakan pertunjukan wayang untuk dewa dengan mengambil kisah Bima Kumara'. Tampaknya fitur-fitur tertentu dari teater boneka tradisional telah bertahan sejak saat itu. Galigi adalah seorang artis keliling yang diminta untuk tampil dalam acara kerajaan yang istimewa. Pada acara itu, ia menampilkan cerita tentang pahlawan Bima dari Mahabharata.

Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada, seni pertunjukan ini menjadi media efektif menyebarkan agama Hindu. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata.

Demikian juga saat masuknya Islam, ketika pertunjukan yang menampilkan "Tuhan"



HARI WAYANG NASIONAL

oleh: Fauziah Nurunnajmi

atau "Dewa" dalam wujud manusia dilarang, munculah boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana saat pertunjukan yang ditonton hanyalah bayangannya saja. Wayang inilah yang sekarang kita kenal sebagai wayang kulit. Untuk menyebarkan Islam, berkembang juga wayang Sadat yang memperkenalkan nilai-nilai Islam.

Perkembangan wayang pada dari abad 19 hingga abad ke 20 tidak lepas dari para Dalang yang terus mengembangkan seni tradisional ini. Salah satunya almarhum Ki H. Asep Sunandar Sunarya yang telah memberikan inovasi terhadap wayang agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan dikenal dunia. Wayang memiliki makna yang dapat direfleksikan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam wayang seperti memayu-hayu

bawana atau membuat tatanan dunia yang damai, jiwa kesatria, budi luhur dan kesempurnaan hidup dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia.

Tepat pada 17 Desember 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional.

Hari Wayang Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran, persatuan, serta kecintaan masyarakat terhadap wayang Indonesia. Dengan begitu, masyarakat dapat melestarikan, mengembangkan serta mengkaji wayang dalam rangka mewujudkan kebudayaan nasional yang dinamis dan modern.

Penetapan Hari Wayang Nasional juga diharapkan mampu mendorong masyarakat un-

TAHUKAH ANDA

tuk meningkatkan apresiasi terhadap wayang sebagai aset budaya nasional. Sekaligus menjadi sarana untuk pembentukan jati diri dan karakter bangsa.

Dilansir dari laman Kemdikbud, ada lebih dari 100 jenis wayang yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Misalnya Wayang Kulit Purwa yang berkembang pesat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wayang Golek Sunda berkembang di Jawa Barat dan Wayang Kulit Parwa di Bali.

Di Nusa Tenggara Barat, ada Wayang Sasak yang berkembang dengan pesat. Selain itu, ada juga Wayang Banjar, Wayang Palembang, Wayang Orang, Wayang Klitik, Wayang Suket, Wayang Beber, Wayang Potehi, Wayang Suluh dan masih banyak lagi. Dan tercatat ada 60 jenis wayang lainnya dalam data WBTb Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) mengadakan serangkaian acara pewayangan dalam rangka peringatan Hari Wayang Nasional 2023. Rangkaian acara ini digelar di Teater Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 1-7 November 2023.

Perayaan Hari Wayang Nasional tahun ini meliputi sejumlah acara, salah satunya adalah Festival Dalang Anak. Festival Dalang Anak, yang digelar pada 2-4 November, merupakan salah satu upaya PEPADI dalam mendekatkan kesenian wayang pada anak muda. Festival berbentuk kompetisi ini bisa diikuti oleh anak-anak dari usia 8-15 tahun.

Pagelaran Wayang Millennial, hingga penampilan dua dalang dalam satu panggung. Sedangkan, Pagelaran Wayang Milenial akan menampilkan aksi Pramaliza Fadhlansyah menjadi seorang dalang. Prama akan menunjukkan kebolehannya dalam pagelaran tersebut pada 5 November.

Dilansir dari antaranews.com, Ketua Umum PEPADI Pusat Ir. Tumiyono menjelaskan bahwa pihaknya menilai tepat langkah yang dilakukan generasi muda dunia wayang dalam mengelola sebuah peradaban bangsa menuju budaya agung yang sudah dilestarikan nenek moyang sejak lama. Apalagi saat ini jumlah dalang nasional jauh lebih banyak ketimbang empat dekade silam



1



3



2



4



SETJEN
WANTANNAS RI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

28 Oktober 2023

SELAMAT MEMPERINGATI HARI
**SUMPAH
PEMUDA**



**95 TAHUN
SUMPAH PEMUDA**
BERSAMA MAJUKAN INDONESIA

